

Media Cetak	Harian Fajar
Tanggal	Jumat 31 Januari 2025
Wilayah	Kabupaten Luwu



DPRD Desak Pemda Tarik Retribusi TKA

DPRD Desak Pemda Tarik Retribusi TKA

BELOPA, FAJAR — Kabupaten Luwu menjadi salah satu daerah dengan jumlah tenaga kerja asing (TKA) yang cukup besar. Namun, keberadaan mereka belum berkontribusi terhadap pendapatan daerah melalui retribusi.

Berdasarkan perhitungan pemerintah daerah, sebanyak 125 TKA di Luwu berpotensi menyumbang retribusi hingga Rp100 miliar per tahun. Akan tetapi, hingga saat ini retribusi TKA belum bisa ditarik karena mereka belum memiliki alamat domisili di Luwu.

"Kita belum bisa mena-

rik retribusinya karena mereka masih belum beralamat di Luwu," kata Ketua DPRD Luwu, Gazali Baso Hidayat, kepada FAJAR, Kamis, 30 Januari.

Mengatasi hal ini, Komisi 3 DPRD Luwu melakukan studi tiru ke Morowali guna menyusun regulasi yang memungkinkan pemungutan retribusi TKA. Selain itu, DPRD telah menggelar sidak dan rapat dengar pendapat dengan perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja asing.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Luwu, Hasbullah,

menbenarkan bahwa retribusi TKA di PT Bumi Mineral Sulawesi (BMS) di Bua belum ditarik. "Soalnya mereka belum berdomisili di Luwu. Ada juga yang masih ditempatkan di luar daerah," ujar Hasbullah.

Selain PT BMS, TKA juga bekerja di beberapa perusahaan lain, termasuk PT Anhe Konstruksi Indonesia (AKI) yang mempekerjakan 19 orang. Namun, laporan PT BMS menyebutkan hanya ada 46 TKA yang tercatat dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), sementara sisanya bekerja di Toraja.

Hasbullah menegaskan, pihaknya akan menertibkan data TKA untuk mengejar retribusi yang bisa menjadi sumber pendapatan bagi APBD Luwu. "Kami akan meminta dokumen dari perusahaan untuk ditindaklanjuti ke kementerian. Seharusnya ini sudah berjalan, tetapi masih ada kendala administrasi," jelasnya.

Berdasarkan perhitungan, setiap TKA wajib membayar pajak sebesar 100 dolar AS atau sekitar Rp1,6 juta per orang. Jika jumlah TKA mencapai 100 orang, potensi retribusi bisa mencapai Rp100 miliar per tahun.

Selain persoalan retribusi, DPRD Luwu juga menyoroti pentingnya peningkatan keterampilan tenaga kerja lokal agar bisa bersaing dengan tenaga kerja asing. Hasbullah menekankan perlunya penyesuaian kurikulum pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK) Luwu sesuai dengan kebutuhan perusahaan.

"Jika PT BMS, misalnya, membutuhkan welder tahun ini, maka BLK harus membuka pelatihan welder. Harus ada MoU antara perusahaan dan Pemda Luwu agar tenaga kerja lokal mendapat kesempatan lebih besar," tutupnya. **(shd/mum)**